

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

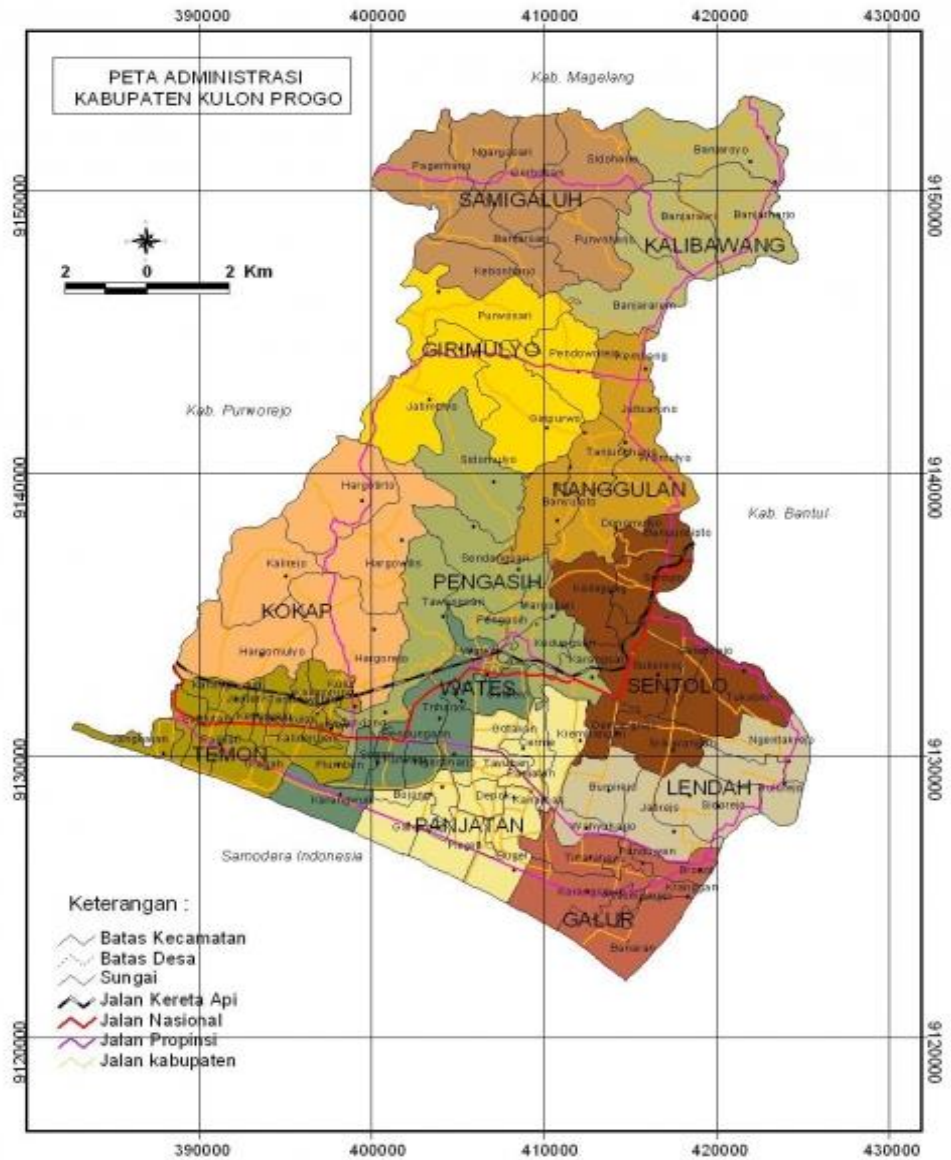
2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kulon Progo

2.1.1 Kondisi Geografi Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta selain Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, Sleman dan Kota Jogja, letak dari Kabupaten Kulon Progo berada pada posisi paling Barat DIY. Kabupaten Kulon Progo yang beribukota di Wates juga merupakan ‘pintu gerbang’ bagi Daerah Istimewa Yogyakarta dimana Kabupaten Kulon Progo ini menghubungkan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan yang terletak pada bagian barat Pulau Jawa dan utara Pulau Jawa, posisi tersebut memberikan keuntungan bagi perkembangan bagi wilayah Kabupaten Kulon Progo maupun perkembangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara astronomis Kabupaten Kulon Progo terletak diantara $7^{\circ}38'30''$ - $7^{\circ}58'3''$ LS dan $110^{\circ}1'37''$ - $110^{\circ}16'26''$ BT, jika dari posisi geostrategic Kabupaten Kulon Progo yang terletak di bagian barat Daerah Istimewa Yogyakarta dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Jika dilihat dari peta maka Kabupaten Kulon Progo terlihat sebagai berikut:

Gambar 2.1 Peta Kabupaten Kulon Progo



Sumber: <http://www.kulonprogokab.go.id>

Kabupaten Kulon Progo sebagaimana terlihat dalam peta memiliki luas wilayah 58.627,512 ha (586, 28 km²), dimana terdiri dari 12 kecamatan yang meliputi 88 desa dan 930 dusun. Penggunaan tanah di Kabupaten Kulon Progo, yaitu meliputi:

Tabel 2.1 Penggunaan Tanah Kabupaten Kulon Progo

No	Penggunaan Tanah	Luas/Ha	Dalam persen (%)
1	Sawah	10.732,04	18,30%
2	Tegalan	7.145,42	12,19%
3	Kebun Campur	31.131,81	53,20%
4	Perkampungan	3.337,73	5,69%
5	Hutan	1.025	1,75%
6	Perkebunan Rakyat	486	0,80%
7	Tanah tandus	1.225	2,09%
8	Waduk	197	0,34%
9	Tambak	50	0,09%
10	Tanah lain-lain	3.315	5,65%

Sumber: <http://www.bpkp.go.id>

Batas wilayah Kabupaten Kulon Progo yaitu sebelah Barat Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, sebelah Timur Kabupaten Sleman dan Bantul, Propinsi D.I. Yogyakarta, sebelah Utara yaitu Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah serta sebelah Selatan Samudera Hindia. Batas topografi Kabupaten Kulon Progo sebelah Barat 110 derajat Bujur Timur 1' 37", sebelah Timur : 110 derajat Bujur Timur 16' 26", sedangkan sebelah Utara 7 derajat Lintang Selatan 38' 42" dan sebelah Selatan : 7 derajat Lintang Selatan 59' 3"

Kondisi Topografi Kabupaten Kolon Progo bervariasi yaitu mencapai ketinggian antara 0 - 1000 meter di atas permukaan air laut, dimana terbagi menjadi 3 wilayah meliputi :

1. Bagian Utara

Kawasan ini berupa dataran tinggi yaitu dengan ketinggian antara 500-1000 meter diatas permukaan laut, contohnya seperti Kecamatan Kokap, Samigaluh, Kalibawang dan Girimulyo. Kawasan ini rawan terhadap bencana tanah longsor dan merupakan suatu kawasan untuk budidaya konservasi.

2. Bagian Tengah

Pada kawasan ini merupakan wilayah perbukitan, dimana ketinggiannya antara 100-500meter diatas permukaan laut, daerahnya meliputi Kecamatan Nanggulan, Pengasih, Sentolo dan sebagian Kecamatan Lendah. Kawasan dengan lereng antara 2-15% kawasannya tergolong berombak serta bergelombang dimana hal ini merupakan suatu peralihan antara dataran rendah dan perbukitan.

3. Bagian Selatan

Pada kawasan selatan merupakan kawasan dataran rendah yaitu ketinggian antara 0-100 meter di atas permukaan air laut, kawasan ini meliputi Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, sebagian Kecamatan Lendah dan Kecamatan Galur. Dilihat berdasarkan kemiringan lahan maka memiliki lereng antara 0-2%, sedangkan yang merupakan wilayah pantai yaitu sepanjang 24,9 km dan apabila terjadi musim penghujan maka merupakan kawasan rawan bencana banjir.

Kabupaten Kulon Progo ini dilewati oleh dua prasarana perhubungan dimana merupakan perlintasan nasional di Pulau Jawa, antara lain jalan nasional yaitu sepanjang 28,57 km serta jalur kereta api, yang panjangnya sekitar 25 km,

sebagian besar wilayah dari Kabupaten Kulon Progo ini dapat dijangkau yaitu dengan menggunakan transportasi darat.

Hamparan wilayah Kabupaten Kulon Progo yaitu mencakup dataran rendah serta dataran tinggi dan daerah perbukitan. Persentase luas dari tanah di Kabupaten Kulon Progo menurut ketinggiannya dari permukaan air laut adalah 17,58 % berada pada ketinggian <7 m diatas permukaan air laut (dpal), 15,20 % berada pada ketinggian 8-25 m dpal, 22,84 % berada pada ketinggian 26-100 m dpal, 33,0 % berada pada ketinggian 101-500 m dpal, dan 11,37 % berada pada ketinggian >500 m dpal. Selama tahun 2015 Kabupaten Kulon Progo memiliki rata-rata curah hujan perbulan mencapai 164 mm serta untuk hari hujan 8 hh perbulan (<http://www.kulonprogokab.go.id>).

2.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Kulon Progo

2.1.2.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 menurut kelompok umur laki-laki dan perempuan yaitu sebesar 445.293, jumlah penduduk perempuan berjumlah 224.073, sedangkan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 221.220. Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan sedikit dibandingkan pada tahun 2014 sebesar 417.473 jiwa (kulonprogokab.bps.go.id).

Tingkat kepadatan penduduk rata-rata mengalami fluktuasi pada tahun 2010 tingkat kepadatan penduduk sebesar 802,55 jiwa/ KM^2 , pada

tahun 2012 mengalami kenaikan yaitu 817,37 jiwa/ KM^2 , sedangkan pada tahun 2013 kepadatan penduduk menurun yaitu 709,93 jiwa/ KM^2 dan pada tahun 2014 naik lagi menjadi 712,11 jiwa/ km^2 , tingkat kepadatan tertinggi yaitu pada Kecamatan Wates, Galur dan Lendah. Secara lebih rinci perkembangan penduduk di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat dari table sebagai berikut:

Tabel 2.2 Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Semester 2

Kecamatan	L	P	L+P
Temon	14.395	14.638	29.033
Wates	24.648	24.536	49.184
Panjatan	19.344	19.659	39.003
Galur	16.331	16.599	32.930
Lendah	20.463	20.717	41.180
Sentolo	24.992	25.232	50.224
Pengasih	25.435	26.025	51.460
Kokap	18.259	18.280	36.539
Girimulyo	12.542	12.674	25.216
Nanggulan	15.089	15.617	30.706
Samigaluh	14.436	14.305	28.741
Kalibawang	15.286	15.791	31.077
Total	221.220	224.073	445.293

Sumber: dukcapil.kulonprogokab.go.id

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Kulon Progo sebagai berikut:

Tabel 2.3 Proyeksi Menurut Kelompok Umur Tahun 2016

No	Kelompok Umur	Jumlah
1	0-24	140.520
2	25-44	115.701
3	45-64	107.547
4	65-74	29.650
5	75 keatas	19.193

Sumber: data diolah dari <https://kulonprogokab.bps.go.id>

Dapat disimpulkan dari tabel diatas kelompok umur terbanyak yaitu pada usia 0 sampai 24 tahun, sedangkan jumlah lanjut usia di Kabupaten Kulon Progo yaitu 19.193 jiwa.

2.1.2.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja

Jumlah pekerja yang lebih banyak dari kesempatan kerja menimbulkan permasalahan yang cukup serius, dan menjadi tugas pokok suatu daerah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk yang sudah mulai padat akan menimbulkan tingkat pengangguran yang cukup tinggi, pada tahun 2014 jumlah pengangguran di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 3,09% atau 8.331 jiwa dari angkatan kerja 269.741 jiwa, dalam hal ini pemerintah harus berusaha menangani pengangguran.

Kondisi tenaga kerja Kabupaten Kulon Progo yang demikian seharusnya perlu mengasah keterampilan dan keuletan oleh sebab itu

penduduk usia produktif sebaiknya dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo maupun dari pihak swasta agar penduduk usia produktif mempunyai keterampilan yang mampuni serta melalui keterampilan tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang cukup. Berikut jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2007-2015:

Tabel 2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2007-2015

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
2007	83.03	60.06	70.85
2008	81.50	63.46	72.13
2009	84.43	62.90	73.27
2010	82.10	65.41	73.48
2011	85.38	65.64	75.17
2012	83.52	67.82	75.40
2013	86.25	65.66	75.61
2014	87.32	67.97	77.34
2015	86.14	65.74	75.62

Sumber: <http://www.bpkp.go.id/diy>

Data dari tabel diatas menunjukkan bahwa capaian partisipasi angkatan kerja Kabupaten Kulon Progo bersifat fluktuatif atau tidak stabil setiap tahunnya. Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 mempunyai beberapa lembaga pelatihan kerja kurang lebih sebanyak 21 lembaga pelatihan, pemerintah memiliki sebanyak 3 buah yaitu BLK, SKB dan LBK dan 1 buah yayasan yaitu Yayasan Dharmais (RKPD Kab. Kulon Progo Tahun 2016).

2.1.3 Kondisi Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo

2.1.3.1 Pendidikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 dapat dilihat bahwa indikator kinerja pada aspek pendidikan yaitu Angka Partisipasi Sekolah, Angka Putus ekolah, Angka Melek Huruf dan capaian kinerja urusan pendidikan PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, manajemen pendidikan, pembinaan sosial budaya dan peningkatan peran serta kepemudaan.

Hasil capaian kinerja pada aspek pendidikan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 dapat dilihat pada aspek angka pertisipasi sekolah yaitu pada tahun 2014 sebesar 103,52% atau mengalami peningkatan 5,8% dari tahun sebelumnya yang mencapai 97,72%. Berikut jumlah penduduk berdasarkan jenjang pendidikan tahun 2016:

Tabel 2.5 Jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	84.156
2	Belum tamat SD/MI	43.035
3	Tamat SD/MI	102.662
4	SMP/MTs	70.534
5	SMA/SMK/MA	117.405
6	Diploma I/II	2790
7	Akademi/ Diploma III/S.Mud	6441
8	Diploma IV/Starta I	17.507
9	Strata II	7222
10	Starata III	41

Sumber: data diolah dari
<http://www.kependudukan.jogjapro.go.id>

Dari tabel diatas membuktikan bahwa masih tingginya penduduk yang tidak sekolah. Kesadaran masyarakat Kabupaten Kulon Progo masih dikatakan lemah dalam hal pendidikan, untuk itu pemerintah dituntut untuk bekerja keras agar masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan.

Angka melek huruf di Kabupaten Kulon Progo pada penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca serta dapat menulis pada tahun 2013 sebesar 93,64% dan tahun 2014 sebesar 94,58% yang berarti mengalami peningkatan sebanyak 0,94%,(RKPD Kab. Kulon Progo Tahun 2016). Jadi dapat disimpulkan sejauh ini Kabupaten Kulon Progo dalam aspek pendidikan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

2.1.3.2 Kesehatan

Dalam aspek kesehatan Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2011 tercatat UHH mencapai 74,48 tahun, tahun 2012 UHH meningkat menjadi 74,58 tahun kemudian tahun 2013 mengalami peningkatan yang sangat bagus yaitu UHH mencapai 75,03 tahun, dimana capaian tersebut berada diatas angka Propinsi yaitu UHH pada tahun 2012 adalah 73,27 tahun, pada tahun 2013 adalah 73,62 tahun.

Peningkatanpun terlihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun 2009 sampai tahun 2013 capaian fluktuatif, yaitu pada tahun 2011 sebesar 105,04/100.000, kemudian tahun 2012 menurun hingga 52,6/100.000

kelahiran hidup, akan tetapi pada tahun 2013 AKI meningkat kembali menjadi 131,52/100.000 KH, pada tahun 2014 dapat ditekan menjadi 94,25/100.000 KH, yang masih berada di atas capaian provinsi yaitu 87,04/100.000 KH. Angka kematian bayi (AKB), pada tahun 2011 mencapai 17,80/1.000 KH menjadi 12,1/1.000 KH pada tahun 2012, tetapi pada tahun 2013 meningkat lagi menjadi 14,84/1.000 KH dan pada tahun 2014 sudah dapat diturunkan menjadi 11,49 /1.000 KH (RKPD Kab. Kulon Progo Tahun 2016).

2.1.3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kulon Progo

Sebagian besar masyarakat Kabupaten Kulon Progo berprofesi sebagai petani terutama petani padi, sedangkan yang lain yaitu sektor jasa dan sektor perdagangan, restoran dan hotel. Sektor pertanian dimana pada tahun 2013 sektor pertanian mencapai 25.54 persen. Sektor pertanian di Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2009 terus mengalami perkembangan akan tetapi pada tahun 2010 terjadi penurunan hal ini disebabkan mundurnya musim tanam, Pada tahun 2011 produksi padi mengalami kenaikan yang cukup tinggi dan berimbas pada peningkatan nilai tambah subsektor tabana yaitu menjadi 7,98 persen. Pertumbuhan yang cukup tinggi pada subsektor pertanian yang cukup besar tentunya akan membuat perekonomian Kabupaten Kulon Progo naik.

Selain sektor pertanian yang cukup maju maka sektor jasa juga mengalami kenaikan terus menerus yaitu sejak tahun 2009 sampai tahun

2014, yaitu dengan kontribusi terbesar oleh sub sektor Pemerintahan Umum (*public services*), disusul berturut oleh sub sektor swasta, kemudian disusul oleh sub sektor sosial kemasyarakatan, kemudian sub sektor perumahan dan rumah tangga, dan sub sektor terkecil penyumbang jasa adalah hiburan dan rekreasi, kenaikan ini didorong oleh perbaikan layanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kulon Progo, namun pada tahun 2014 terjadi penurunan pada sektor jasa ini yaitu menjadi 20.30 persen saja.

Selain sektor pertanian dan sektor jasa yang meningkat terdapat juga sektor perdagangan seperti Hotel, dan Restoran dimana pada tahun 2014 memberikan kontribusi terhadap PDRB sebanyak 17,95 persen. Sektor perdagangan ini didukung oleh adanya kegiatan ekspor berupa hasil industri, seperti arang briket, papan kemas, kerajinan kayu, gula kristal dan wig. Peningkatan PDRB perkapita semestinya dapat memberikan peluang pasar lokal bagi terserapnya produk lokal dan penguatan ekonomi kerakyatan.

2.1.4 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

2.1.4.1 Sejarah Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo

Sejak berdiri secara resmi pada tanggal 15 Oktober 1951, Kabupaten Kulon Progo sudah memiliki 9 bupati. Bupati pertama yaitu KRT.Suryoningrat dimana menjabat sejak tahun 1951 sampai tahun 1959, kemudian kepemimpinannya dilanjutkan oleh R.Prodjo Suparno

pada tahun 1959 sampai tahun 1962, bupati ketiga yaitu KRT.Kertodiningrat dimana menjabat selama 6 tahun yaitu pada tahun 1963 sampai 1969. Bupati Kabupaten Kulon Progo yang keempat yaitu R.Soetedjo menjabat pada tahun 1969 sampai 1975, kemudian dilanjutkan R.Soeparno dimana menjabat selama 5 tahun yaitu pada tahun 1975 sampai 1980, bupati keenam yaitu KRT.Wijoyo Hadiningrat pada tahun 1981 sampai 1991, dilanjutkan oleh Drs.H.Suratidjo dimana menjabat selama 2 periode yaitu pada tahun 1991 sampai 2001. Periode selanjutnya Kabupaten Kulon Progo dipimpin oleh H.Toyo Santoso Dipo dimana menjabat dari tahun 2001 sampai 2011, dan dari tahun 2011 sampai saat ini Kabupaten Kulon Progo dipimpin oleh dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) dimana menang 2 kali periode.

Dalam melaksanakan tugas Bupati dibantu oleh Wakil Bupati beserta dibantu oleh staf yang ahli dalam bidang Hukum dan Politik, Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, SDM serta Ekonomi dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya Bupati Kabupaten Kulon Progo juga dibantu oleh instansi daerah dimana meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, serta dibantu oleh 8 Kantor, 4 Badan, 12 Dinas dan 12 Kecamatan yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 berjumlah 40 orang, sedangkan untuk jumlah pegawai instansi yaitu berjumlah 10.386 pegawai pada tahun 2015, untuk jumlah perangkat desa dimana

tersebar di 12 kecamatan yaitu berjumlah 1.609 pegawai pada tahun 2015.

Kabupaten Kulon Progo dimana pusat pemerintahannya terletak di Kecamatan Wates mempunyai 12 kecamatan yaitu Kecamatan Girimulyo, Kalibawang, Galur, Kokap, Lendah, Nanggulan, Panjatan, Pengsih, Samigaluh, Sentolo, Temon dan Wates serta memiliki 87 desa dan 1 kelurahan, 918 Pedukuhan(SLS Tk 3), 1.885 Rukun Warga (SLS Tk 2) dan 4.469 Rukun Tetangga (SLS Tk 1). Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 dipimpin oleh dr.H.Hasto Wardoyo,Sp.OG(K) sebagai Bupati, ditangan Bpk Hasto Kabupaten Kulon Progo banyak berbenah baik dari segi ekonomi, tata ruang dan sosial.

2.1.4.2 Visi dan Misi Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Progo mempunyai Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang 2005-2015 yaitu:

Visi : “ Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang Maju, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin”

Misi : Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila.
2. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing.

3. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum.
4. Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari.
7. Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri.
8. Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional.

2.1.4.3 Penerapan *E-government* di Kabupaten Kulon Progo

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah bekerja keras dalam menerapkan *e-government* pada seluruh layanan yang ada di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, seperti *website* pemerintah, dinas, kantor dan lainnya. Pemerintah Kabupaten Kulon progo merupakan salah satu kabupaten yang telah menerapkan *e-government*, salah satu wujud penerapan *e-government* di Kabupaten Kulon progo adalah terbentuknya *website* resmi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2002 dengan alamat www.Kulonprogokab.go.id sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 28/PER/M.KOMINFO/9/2006. Situs *website* pemerintah daerah merupakan salah satu strategi didalam melaksanakan penerapan *e-government*, adanya *website* daerah dimana terdapat berbagai informasi

yang bisa diakses oleh masyarakat secara *online*, misalnya pada *website* Kabupaten Kulon Progo terdapat layanan berita daerah, publikasi APBD, profil kabupaten serta layanan lainnya.

Tahun 2017 tepatnya pada bulan Agustus Wakil Bupati Kulon Progo Bpk Drs. H. Sutedjo melakukan *launching free wifi* di Alun-alun Wates hal ini sebagai bentuk pelayanan Pemkab Kulon Progo dalam memberikan akses memperoleh informasi kepada publik, sehingga mempermudah publik mendapatkan informasi yang dibutuhkan, layanan ini berada dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.

Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah selain adanya *free wifi* pemerintah juga melakukan pembentukan satgas penanganan permasalahan jaringan internet SKPD dalam rangka peningkatan layanan gangguan internet dengan melalui sarana komunikasi yang ada seperti telepon, *WhatsApp* atau datang langsung ke Dinas komunikasi dan informatika, agar cepat terselamatkan.

Inovasi guna menunjang terwujudnya *e-government* di Kabupaten Kulon Progo terkait dengan kesehatan maka dibuatlah aplikasi atau layanan SIM Obat yang merupakan aplikasi untuk melakukan pengelolaan obat di Dinas Kesehatan, rumah sakit dan Puskesmas yang berada di Kabupaten Kulon Progo. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo selaku pemilik program SIM

obat maka melakukan uji Sistem Informasi Obat dan sekaligus melakukan pelatihan bagi pengguna aplikasi SIM Obat. Pelatihan serta uji coba dilakukan di Ruang Pelatihan Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan peserta dua puluh satu orang yang merupakan pengelola obat dari Puskesmas di wilayah Kulon Progo, Dinas Kesehatan dan RSUD Wates. Aplikasi SIM obat ini sudah diuji sebanyak dua kali, dalam uji coba yang pertama masih ada beberapa masukan dari pengguna untuk kesempurnaan aplikasi SIM Obat, pada saat ini tinggal entry data dan pengenalan aplikasi bagi pengelola obat.

Selain SIM obat pemerintah juga membuat Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). TNDE ini sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik pada Pemerintah Daerah, pada pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa Tata Naskah Dinas Elektronik yang selanjutnya disingkat TNDE adalah pengelolaan naskah dinas secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. TNDE merupakan wujud dari percepatan penerapan *e-government* guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, sehingga mendorong terwujudnya reformasi birokrasi pada aparatur Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam penerapan *e-government* pada pengadaan membuat Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Secara Elektronik (LPSE) sejak tahun 2008 sesuai dengan intruksi LKPP, dimana berada dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika dan bersifat *Ad hoc*. Pada tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika membuat aplikasi *Smart Report* LPSE yaitu berupa sistem pelaporan pelaksanaan lelang realisasi pengadaan dalam lelang elektronik (*E-tendering* dengan SPSE), guna mewujudkan transparansi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui aplikasi ini pihak-pihak yang berkepentingan dapat melihat realisasi pengadaan barang dan jasa, aplikasi ini masih belum sempurna dikarenakan masih baru dan perlu perbaikan.

2.2 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kulon Progo

Layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE merupakan suatu unit kerja dimana wajib dibentuk di seluruh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya serta sistem LPSE ini juga memfasilitasi ULP atau Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan suatu pengadaan barang/jasa secara elektronik. ULP atau Pejabat Pengadaan pada suatu Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN apabila tidak membentuk LPSE maka dapat menggunakan fasilitas LPSE yang terdekat. Selain dapat memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan LPSE ini juga akan melayani registrasi penyedia barang dan jasa dimana berdomisili di wilayah kerja LPSE yang bersangkutan. Dasar hukum pembentukan LPSE ini yaitu terdapat pada Pasal 111 Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dimana ketentuan teknis operasionalnya diatur dalam

Peraturan Kepala LKPP yaitu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Kabupaten Kulon Progo sudah mempunyai LPSE dimana LPSE ini beralamatkan di Jl. Perwakilan No.1, Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (LPSE Kab Kulon Progo, 2017). Tata kerja LPSE Kabupaten Kulon Progo sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik, Pasal 10 yaitu sebagai berikut:

1. Koordinator, Sekretaris dan Staf Sub Unit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
2. Koordinator, Sekretaris dan Staf Sub Unit masing – masing bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas.
3. Koordinator, Sekretaris dan Staf Sub Unit secara berjenjang wajib menyampaikan laporan sesuai tugasnya.

Setelah terbentuknya LPSE pada tahun 2008, pada tahun 2011 Unit Layanan Pengadaan (ULP) diresmikan oleh Bapak dr. H. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K). ULP mempunyai fungsi yaitu sebagai pengoordinasian kegiatan operasional pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah. Tujuan pembentukan ULP Kabupaten Kulon Progo yaitu Menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih terintegrasi atau terpadu sesuai dengan Tata Nilai Pengadaan dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementrian/ Lembaga/ Daerah/Institusi. ULP Kabupaten Kulon Progo merupakan lembaga non struktural dimana dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian. Penanggungjawab ULP di Kabupaten Kulon Progo ada di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Penyedia barang/jasa dalam mengikuti lelang secara elektronik harus memenuhi persyaratan, dimana persyaratan ini sudah terdapat pada Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pasal 12 sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri kepada ULPSE dan bersedia untuk dilakukan verifikasi secara azas nyata oleh ULPSE atau yang diberi kuasa sebelum Penyedia Barang/Jasa diberi kode akses untuk masuk ke dalam sistem pengadaan secara elektronik
- b. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa
- c. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa
- d. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana
- e. Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak
- f. Sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan foto copy bukti tanda terima penyampaian

Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29

- g. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak
- h. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa
- i. Tidak masuk dalam daftar hitam
- j. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos
- k. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai.

Persyaratan diatas harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa, kalau tidak memenuhi persyaratan maka dapat dikatan keikutsertaannya batal.

2.2.1 Dasar Hukum Pembentukan LPSE

Dasar hukum yang dipakai dalam pembentukan LPSE Kabupaten Kulon Progo yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik.
4. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik,
5. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan
6. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik sedangkan

2.2.2 Susunan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Kulon Progo

LPSE Kabupaten Kulon Progo berbentuk tim dan pada tahun 2017 LPSE berada dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo. Berikut susunan organisasi LPSE Kabupaten Kulon Progo menurut Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/jasa Secara Elektronik, dimana Susunan Organisasi ULPSE terdiri dari:

1. Koordinator
2. Sekretariat
3. Sub Unit – Sub Unit:
 - a. Sub Unit Administrasi Aplikasi.
 - b. Sub Unit Pelayanan Informasi.

- c. Sub Unit Pelatihan.
- d. Sub Unit Verifikasi.

2.2.3 Fungsi dan Tugas LPSE Kabupaten Kulon Progo

Fungsi LPSE Kabupaten Kulon Progo sudah tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik yaitu pada Pasal 4 dijelaskan bahwa tugas dari LPSE adalah penyelenggaraan layanan proses pengadaan barang / jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2008 mengatakan bahwa tugas LPSE Kabupaten Kulon Progo yaitu:

- a. Menyelenggarakan ketatausahaan
- b. Menyelenggarakan administrasi aplikasi
- c. Menyelenggarakan pelatihan penggunaan LPSE
- d. Menyelenggarakan pelayanan informasi
- e. Melaksanakan verifikasi proses LPSE.

LPSE Kabupaten Kulon Progo yang berdiri sejak tahun 2008 sampai tahun 2017 sudah melakukan lelang kurang lebih sebanyak 1.192 lelang dari 5 kategori yang ada di *website* LPSE yaitu pengadaan barang, jasa konsultasi badan usaha, jasa konsultasi perorangan, pekerjaan kontruksi dan jasa lainnya. *Website* LPSE Kabupaten Kulon Progo terdapat berbagai layanan seperti SiRup atau Sistem Informasi Layanan Pengadaan, INAPROC dimana

memuat tentang pengumuman lelang yang diselenggarakan di seluruh Indonesia.

2.2.4 Panitia Kegiatan Penyelenggaraan LPSE Kabupaten Kulon Progo

Staf LPSE Kabupaten Kulon Progo berbentuk *ad hoc* atau tidak permanen dimana susunan panitia di buat oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 08/2017 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun Anggaran 2017 berikut susunan panitia pelaksana kegiatan penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barng/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (LPSE):

Tabel 2.6: Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	Penanggung jawab Program II	Drs. R. Agus Santosa, MA.	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
2	Pembantu Penanggung Jawab Program	Heri Darmawan, AP.	Sekretaris Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
3	Penanggungjawab Kegiatan	Cahyono, ST.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Rusdi Suwarno, SIP, MM.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Bidang

			Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
5	Sekretaris Pelaksana	Bagyo Purwanto, A.Md.	Pranata Komputer Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
6	Koordinator Tim Pelaksana	Anita Fajar Rianti, A.Md.	Pranata Komputer Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
7	Anggota I	1. Jauhari Ahmad, A.Md. 2. Tahuchid, A.Md. 3. Supri, S.S.T.	Pranata Komputer Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo. Pengumpul Dan Pengolah Data Pengembangan Sistem Informasi Seksi Pengembangan Sistem Informasi Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo. Penyiap Bahan Sarana Teknologi Informasi Seksi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
8	Anggota II	1. Fitri Nugraheni, A.Md.	Penyiap Bahan Pengembangan Informasi Seksi Pengembangan Sistem Informasi Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan

		2. Bambang Sulistyanto, A.Md	Informatika Kabupaten Kulon Progo. Penyiap Bahan Pengembangan Informasi Seksi Pengembangan Sistem Informasi Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.
--	--	------------------------------	--

Sumber: Keputusan Kepala Dinas Kominikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo Nomor 08/2017.

Tabel diatas menunjukan bahwa staf LPSE meskipun bersifat *ad hoc* mempunyai rangkap jabatan yaitu sebagai staf LPSE dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon ProgO.